

TREND PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN *PUBLIC* SEKTOR PERBANKAN DENGAN *SCORECARD CORPORATE GOVERNANCE* DITINJAU DARI MANAJEMEN RISIKO

Oleh :

**Elizabeth Lucky Maretha Sitinjak dan
Lucia Hari Patworo**

Abstract

Semakin ketatnya kebijakan pemerintah kepada perbankan dalam beroperasi di Indonesia, ada lima prinsip wajib diperhatikan dan diterapkan oleh Dewan Direktur dan Komisaris yaitu: (1) transparansi; (2) kemandirian; (3) akuntabilitas; (4) pertanggungjawaban; dan (5) kewajaran. Dengan lima prinsip ini Good Corporate Governance (GCG) dapat selalu dievaluasi dan terukur dengan penggunaan riset metodologi Corporate Governance Scorecard (CGS) yang memiliki empat pilar, yaitu: (1) kepuasan pelanggan; (2) produktivitas; (3) cost effectiveness proses bisnis/ intern; (4) pembelajaran dan pertumbuhan. Di samping itu Bank Indonesia sendiri sudah menerapkan Risk Based Supervision (RBS). Penerapan ini membagi tujuh kelompok besar menurut jenis risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategis. Artikel ini akan mendiskusikan bagaimana cara mengurangi risiko bank, mengevaluasi dari Manajemen Risiko di sektor Perbankan.

PENDAHULUAN

Hampir semua bank ingin menjadi besar, namun kebanggaan sebagai bank besar harus diiringi dengan keberhasilan meningkatnya kinerja bank. Keputusan Menteri BUMN nomer Kep-117/ M-MBU/ 2002 tanggal 1 Agustus 2002, sebagai tindak lanjut dari surat edaran ketua BAPEPAM nomer SE-03/ PM/ 2000 tanggal 5 Mei 2000 (Tjager, I. N., et. All, 2003), didalamnya mensyaratkan penerapan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada semua perusahaan *go public* sebagai landasan operasionalnya. Ada lima prinsip yang senantiasa wajib diperhatikan dan diterapkan oleh Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawas (Tjager, I. N., et. All, 2003), yaitu : (1) **transparansi**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan; (2) **kemandirian**, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang

tidak sesuai dengan pengaturan perundang-undanganyang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; (3) **akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; (4) **pertanggungjawaban**, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan (5) **kewajaran**, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan 5 prinsip ini GCG haruslah selalu dievaluasi dan diukur.

Dalam perkembangannya metodologi penelitian GCG menggunakan *Corporate Governance Scorecard* (CGS), yaitu diukur dengan *scorecard* (kartu skor) yang pada dasarnya dari *balanced scorecard* (perimbangan antara aspek keuangan dan non keuangan; jangka pendek dan jangka panjang; intern dan ekstern), yang memiliki empat pilar,

yaitu (1) kepuasan *customers*; (2) produktivitas; (3) *cost effectiveness* proses bisnis/ intern; (4) pembelajaran dan pertumbuhan. Empat pilar ini sering disebut dengan “*the real drives*” (Mulyadi, 2001). Hanya saja dalam CGS yang diukur Pemilik Modal atau Pemegang Saham, Komisaris/ Dewan Pengawas, dan Komite Audit. Beberapa tim peneliti *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (TIICG) telah memiliki Nilai *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) Indonesia pada tahun 2002 (www.infobank.co.id) sudah mencapai 74,61 (dari skala 0-100), dimana para emiten di Bursa Efek Jakarta (BEJ) khususnya sektor perbankan sudah dianggap lumayan dalam GCG. Bahkan sepuluh besar CGPI telah ditentukan, dan secara berturut-turut dapat dilihat angka skornya: Bank Central Asia (90.46), Bank Universal (89.05), Bank Niaga (88.55), Kalbe Farma (88.42), Astra International (87.95), Bank Lippo (87.43), Bank Negara Indonesia (87.00), Unilever Indonesia (86.93), Bimantara Citra (85.31), Dankos Laboratories (85.17). Tim peneliti TIICG mengatakan angka skor tersebut menggambarkan nilai yang telah mencapai kriteria implementasi CG, yang prioritas implementasi merupakan kompilasi dari persepsi responden dan Panel Ahli. Sedangkan mean rata-rata variabel CG terlihat dari 7 variabel secara berturut-turut sebagai berikut: komitmen terhadap CG (66.79), hak pemegang saham (93.21), tata kelola dewan komisaris (63.62), komite-komite fungsional (59.83), direksi (64.83), transparansi (82.81), hubungan dengan stakeholder (83.67). Dalam penelitian TIICG memiliki keterbatasan di dalam analisisnya, karena analisis hanya mampu memotret aspek formal dari implementasi GCG-nya. CGS yang digunakan CGPI adalah memadukan *self-assesment* dengan penilaian pihak eksternal. Untuk penilaian pihak eksternal mencakup uji kebenaran jawaban *scorecard* lewat pengecekan pada dokumen tertulis (dilakukan peneliti IICG) dan perbandingan pembobotan (dilakukan para Panel Ahli) (Indra, 2003).

Selain CG manajemen risiko juga sangat penting dalam dunia perbankan. Hal ini terlihat dari pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia pada bank-bank umum, pengawasan yang berbasis risiko *Risk Based Examination* (RBE). Sistem RBE yang dipakai BI sendiri telah sesuai dengan standar internasional yang mengacu pada *Office of The Comptroller of The Currency* (OCC) dan *Federal Reserve System of New York* (FED) yang berpedoman pada *Task Force Risk Based Supervision* (RBS) (Paimpo, 2003).

Task Force dalam penerapannya membagi tujuh kelompok besar menurut jenis risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategik. Pengukuran risiko (*Risk assessment*) ini dimaksudkan untuk menghitung potensi kerugian apabila risiko-risiko tersebut benar-benar terjadi. Potensi kerugian dimasa yang akan datang dapat dihitung berdasarkan pengalaman masa lalu yang terjadi di pasar atau diderita oleh bank. Ukuran *task force* disini dibagi atas 7 kelompok: perkreditan (*lending*), treasury dan investasi (*treasury and investment*), operasional dan jasa bank (*bank operation and service*), pembiayaan perdagangan (*trade finance*).

Dari permasalahan diatas maka muncul suatu pemikiran bagaimana cara mengurangi risiko bank yang akan diterima dari perkreditan (*lending*), treasury dan investasi (*treasury and investment*), operasional dan jasa bank (*bank operation and service*), pembiayaan perdagangan (*trade finance*). Hal ini akan terlihat dari makin meningkatnya *Corporate Governance Perception Index* kepada bank-bank di Indonesia, dengan kata lain *Corporate Governance* Ditinjau dari Manajemen Risiko di Sektor Perbankan.

Manajemen Risiko dalam Corporate Governance

Defisit anggaran AS semakin memicu naiknya harga minyak yang tidak akan dibendung lagi tahun 2005. Sampai 3 bank besar Indonesia meminta jaminan kepada pemerintah akan

impur minyak. Meskipun Indonesia salah satu negara produsen minyak mentah, namun kebutuhan bahan bakar di dalam negeri Indonesia masih mengimpornya. Dampak lainnya harga di sektor lain juga akan naik. Bagaimanakah dampak kenaikan harga minyak mentah dunia dan rentetan akibatnya adalah diluar control dari perusahaan perbankan? Bagaimanakah pertanggungjawaban perusahaan perbankan terhadap *stakeholders*-nya mengenai hal ini?

Dalam *Enterprise-Wide Risk Management*, risiko perusahaan bukan hanya *financial risk* (risiko keuangan) saja, seperti risiko gagal bayar dalam suatu transaksi keuangan, risiko kesalahan dalam *accounting system* perusahaan ataupun risiko perubahan nilai mata uang. Selain risiko keuangan ada yang disebut risiko teknis, risiko operasional, dan risiko pasar (lazim disebut *market risk* atau *commercial risk*).

Dalam risiko teknis, kemungkinannya risiko yang terjadi terhadap asset-aset fisik perusahaan seperti kerusakan peralatan dan infrastruktur. Dalam risiko operasional, risiko terletak pada *human factor*, diantaranya *human error*, keselamatan dan kesehatan pekerja, proses seleksi, dan skill (bersifat kualitatif). Sedangkan dalam risiko pasar, risiko terletak pada perubahan-perubahan yang terjadi terhadap market produk dan jasa perusahaan. Disinilah perlunya manajemen risiko buat sektor perbankan terhadap perkreditan (*lending*), treasury dan investasi (*treasury and investment*), operasional dan jasa bank (*bank operation and service*), pembiayaan perdagangan (*trade finance*), serta menghitung tingkat *Corporate Governance Perception Index* (bersifat kuantitatif) sehingga GCG pada perbankan nasional dapat meningkat dan semakin baik dan kerugian yang dulu diderita Indonesia akibat krisis yang mungkin akan terjadi lagi dapat diminimalisir. Dapat ditarik kesimpulan dari uraian diatas bahwa risiko-risiko bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dengan demikian risiko bersifat kualitatif dapat dipetakan dalam empat bentuk: (1) risiko

dengan *impact* yang besar dan frekuensi yang tinggi atau sering, seperti fluktuasi nilai mata uang atau produk perusahaan yang dibajak atau dipalsukan; (2) risiko dengan *impact* yang besar namun frekuensi rendah atau jarang, seperti bencana alam atau pemboman pusat bisnis dan perdagangan; (3) risiko dengan *impact* yang kecil namun frekuensinya tinggi atau sering, seperti pengambilan inventory kantor (misalnya alat-alat tulis); (4) risiko dengan *impact* yang kecil serta frekuensinya rendah atau jarang, seperti pencurian inventory kantor oleh orang luar. Sedangkan yang kuantitatif dapat langsung di ukur dengan SCG.

Dalam proses identifikasi risiko-risiko ini dapat ditambahkan satu variable lagi, yaitu apakah risiko-risiko (bersifat kualitatif atau kuantitatif) tersebut diasuransikan atau tidak, dilakukan *hedging* (seperti fluktuasi mata uang asing), atau dilakukan juga *contingency plan* (menyiapkan kantor cadangan yang secara teknis siap beroperasi apabila terjadi peledakan bom).

Berdasarkan kondisi tersebut, maka masalah yang akan timbul adalah sejauh manakah manajemen risiko dapat meningkatkan *Corporate Governance Perception Index* Bank Umum Nasional Indonesia yang telah *go public*. Apakah semakin tingginya kita mengatur manajemen risiko akan membuat *Corporate Governance Perception Index* semakin tinggi? Atau sebaliknya. Hal ini terbuka untuk perlu dibuktikan dalam penelitian empiris nantinya mengenai peningkatan atau penurunan *Corporate Governance Perception Index* dengan memberlakukan manajemen risiko dan *corporate governance* di Bank-Bank Umum Nasional Indonesia.

Etika dan Moral Bankir

Kegiatan bisnis bank berbeda dengan kegiatan bisnis lain pada umumnya. Di dalam bank, aset utama adalah uang nasabah yang dititipkan. Karena itu, bank menerima kepercayaan orang atau lembaga lain. Unsur kepercayaan ini harus

dikelola secara hati-hati dengan dasar etika dan moral bankir yang diberi kepercayaan. Secara umum, etika dan moral ini meliputi etika ekstern dan etika intern. Etika intern berkaitan dengan sikap dan perilaku karyawan bank sehari-hari:

- a. Memegang teguh etika bisnis dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral;
- b. Mementingkan transparansi, tanggung jawab dan akuntabilitas;
- c. Menjadi *good corporate citizen* (warga negara perusahaan) yang baik;
- d. Memberikankualitas pelayanan terbaik kepada nasabah;
- e. Mengembangkan karyawan.

Secara umum, etika dan moral ini meliputi etika ekstern dan etika intern. Etika intern berkaitan dengan sikap dan perilaku karyawan bank sehari-hari. Beberapa hal penting yang dapat disebutkan di sini antara lain (Hinuri, H., 2002):

- a. Lebih mementingkan kerjasama tim (organisasi) daripada individu. Etika ini biasanya diterjemakan secara lebih sederhana menjadi “jangan mencari nama untuk diri sendiri”.
- b. Menghindari *conflict of interest* (benturan kepentingan). Manifestasi ini sangat menonjol dalam kegiatan usaha perusahaan sehari-hari. Setiap tahun setiap karyawan diminta menandatangani Surat Pernyataan tentang Standar Etika dan Perilaku Karyawan. Di Bank bukannya tidak ada benturan kepentingan, tetapi yang dapat dijamin adalah kalau terjadi benturan kepentingan, maka sanksinya diberlakukan secara tegas dan konsisten. Hal ini tidak saja berlaku pada masa lalu, tetapi tetap dijalankan hingga saat ini dan juga di masa yang akan datang. Bank tidak akan berkompromi terhadap praktik-praktik benturan kepentingan dalam bentuk dan alasan apapun.

Etika ekstern adalah sikap dan perilaku dalam perilaku dalam berhubungan dengan pihak di luar Bank. Beberapa bentuk etika dan moral yang ditekankan bagi karyawan Bank adalah:

- a. Tidak memberikan kemudahan-kemudahan kredit yang melanggar batas prinsip kehati-hatian, hanya demi memenagkan persaingan;
- b. Tidak mengejar kemakmuran sendiri, sementara lingkungan terlantar.
- c. Tidak memberikan kredit kepada perusahaan yang jelas-jelas merusak lingkungan atau merugikan negara.

Etika dan moral memberikan tempat yang tepat di dunia perbankan. Hal ini dapat ditularkan melalui 3 sumber utama: (1) kepemimpinan, kepemimpinan yang bersih dapat menjadi panutan bagi bawahannya, menjunjung tinggi integritas kepribadian dan profesionalisme. Nilai-nilai ini ditularkan oleh para pendiripada para manajer yang menjadi budaya sehari-hari; (2) pada para supervisor dalam proses pengkaderan dan pelatihan para karyawan.; (3) penegakan aturan dan sanksi yang keras. Ini dimulai disaat pelamar diterima menjadi seorang karyawan.

Risiko Pembiayaan Modal

Ketidakpastian (*uncertainty*) adalah kondisi yang dihadapi oleh seseorang, apabila masa yang akan datang mengandung sejumlah kemungkinan peristiwa yang akan terjadi yang tidak kita ketahui. Dalam ketidakpastian semua kemungkinan dapat terjadi, kita dapat menduga-duga atau memperkirakan hasil apa yang terjadi namun kita masih agak sulit mengetahui kemungkinan peristiwa yang akan terjadi. Kepastian (*certainty*) menyangkut peristiwa masa yang akan datang yang mengandung suatu kemungkinan hasil yang sudah dapat diketahui pada waktu ini.

Suatu pengeluaran/ pembiayaan modal didefinisikan sebagai penggunaan dana, contohnya kas. Untuk menyediakan harta, operasi yang akan menolong untuk mendapatkan pendapatan di masa mendatang, mengurangi biaya masa datang. Pembiayaan modal menjadi biaya (*expense*) dimasa mendatang, jika jasa/barang terkait digunakan untuk mendapatkan keuntungan masa datang dari pendapatan masa datang atau untuk

mencapai penghematan biaya yang akan datang. Pembiayaan modal biasanya diklasifikasikan dalam suatu anggaran pembiayaan modal sebagai berikut (Purwatiningsih-Maudy Warrouw,1998) :

- a. Proyek-proyek tambahan modal utama. Biasanya membutuhkan suatu ikatan atas jumlah dana yang besar untuk harta-harta operasi yang sudah ada untuk suatu periode jangka panjang.
- b. Pembiayaan modal minor / kecil. Proyek ini kecil, biayanya rendah, berulang dan merupakan pembiayaan modal biasa. Proyek ini biasanya dikelompokkan bersama sebagai suatu jumlah bulanan tersendiri (*pembagian/appropriation*) untuk tujuan penganggaran barang modal.

Anggaran pembiayaan modal mempunyai suatu orientasi proyek yang kuat karena hampir semua proyek melibatkan jumlah dana dan waktu yang besar. Karakteristik penting lainnya dari anggaran pembiayaan modal adalah dimensi waktu. Dimensi waktu dari anggaran pembiayaan modal harus konsisten dengan rencana laba menyeluruh sehingga anggaran pembiayaan modal harus meliputi (Purwatiningsih-Maudy Warrouw,1998):

- a. Anggaran pembiayaan modal *strategis* (jangka panjang)
- b. Anggaran pembiayaan modal *taktis* (jangka pendek)

Anggaran pembiayaan modal meliputi tiga dimensi waktu yaitu (Purwatiningsih-Maudy Warrouw,1998) :

1. Suatu dimensi waktu yang diminta oleh proyek tertentu yang memperluas paling jauh masa ke depan.
2. Suatu dimensi waktu yang sesuai dengan rencana, laba, *strategis* jangka panjang.
3. Suatu dimensi waktu yang sesuai rencana laba jangka pendek.

Proses anggaran untuk tambahan modal penting bagi manajemen untuk menghindari (Purwatiningsih-Maudy Warrouw,1998): kapasitas operasi yang menganggur, kelebihan kapasitas, dan investasi dalam kapasitas yang

akan menyebabkan berkurangnya suatu pengembalian atas dana yang diinvestasikan.

Perkembangan anggaran pembiayaan strategis (jangka panjang) dan taktis (jangka pendek) juga menguntungkan karena membutuhkan keputusan pembiayaan modal dari manajemen. Anggaran pembiayaan modal juga mengarahkan perhatian manajemen pada arus kas, suatu masalah penting dan sering terabaikan. Di beberapa kasus, beberapa proyek akan saling menguntungkan dan akan merupakan keputusan "dan atau" yang harus dibuat atas proyek-proyek tersebut (Purwatiningsih-Maudy Warrouw,1998)

Keputusan pembiayaan modal yang penting merupakan keputusan manajemen setelah membandingkan alternatif-alternatif pembiayaan modal. Keputusan seperti itu harus memperhatikan dua masalah (Purwatiningsih-Maudy Warrouw,1998):

- a. Keputusan investasi memilih alternatif terbaik berdasarkan nilai ekonomisnya bagi perusahaan disebut nilai investasi.
- b. Keputusan pembiayaan menentukan jumlah dan sumber dana yang dibutuhkan untuk membayar alternatif-alternatif terpilih.

Pembiayaan modal mencakup dua asset yaitu: *Asset* yang dapat disusutkan (*aktiva*) dan aset yang tidak dapat disusutkan (*pasiva*). Total pengembalian kas atas dua jenis tambahan modal akan berbeda:

- a. Aset yang dapat disusutkan biasanya tidak mempunyai atau punya nilai sisa yang kecil pada akhir umurnya.
- b. Aset yang tidak dapat disusutkan biasanya meninggalkan investasi dalam keadaan lengkap pada akhir periode investasi.

Semakin besar investasi perusahaan dalam asset lancar, semakin besar *likuiditasnya*. Perusahaan dapat mengurangi risiko likuiditas hanya dengan mengurangi pengembalian keseluruhan dalam dana yang diinvestasikan dan sebaliknya.

Risiko Kredit Kebijaksanaan Kredit

Jumlah piutang ditentukan oleh volume penjualan kredit dan rata-rata waktu antara penjualan dan penagihan atau rata-rata jangka waktu penagihan. Rata-rata waktu penagihan sebagian tergantung pada kondisi perekonomian dan sebagian lagi pada faktor-faktor yang bisa dikendalikan yaitu variabel kebijaksanaan kredit. Variabel utama kebijakan itu mencakup (J. Freed Weston,1993):

1. Standar kredit, yaitu tingkat risiko maksimum yang bisa ditolerir dari seorang langganan kredit.
2. Persyaratan kredit, yaitu lamanya kredit diizinkan dan persentase pemberian potongan pada pembayaran yang cepat.
3. Kebijaksanaan penagihan yang dilakukan perusahaan.

Standar Kredit

Penentuan standar kredit yang optimal mencakup perkaitan antara biaya marginal kredit dengan laba marginal karena kenaikan penjualan. Untuk menilai risiko kredit didasarkan pada 5 C yaitu :

1. *Character* (karakter pribadi); menggambarkan besarnya probabilitas bahwa langganan bersangkutan akan memenuhi kewajibannya.
2. *Capacity* (kemampuan); merupakan penilaian subyektif atas kemampuan membayar dari langganan.
3. *Capital* (modal); diukur dari posisi keuangan perusahaan
4. *Collateral* (jaminan); aktiva yang ditawarkan langganan sebagai jaminan daripada kredit yang diberikan perusahaan.
5. *Conditions* (kondisi perekonomian); adalah gambaran dampak trend perekonomian umum atas perusahaan dan daerah atau sektoral yang mungkin mempengaruhi kemampuan langganan memenuhi kewajibannya.

Persyaratan Kredit

Persyaratan kredit mencantumkan jangka waktu kredit dan adanya potongan (*discount*) bila dibayar lebih cepat. Kalau penjualan bersifat musiman maka perusahaan bersangkutan akan mempersyaratkan tanggal menurut musim (J. Freed Weston,1985).

- a. Jangka waktu kredit. Memperpanjang jangka waktu kredit akan merangsang peningkatan penjualan, hanya saja harus diingat biaya terikatnya dana dalam piutang.
- b. Potongan kas. Pemberian potongan kas juga harus dianalisis dengan cara yang sama. Rata-rata jangka waktu penagihan juga akan menjadi lebih singkat karena adanya langganan lama yang ingin memanfaatkan potongan yang diberikan sehingga membayar lebih cepat. Kemanfaatan ini diimbangi dengan biaya pemberian potongan. Dengan demikian potongan yang optimal adalah pada titik dimana biaya sama dengan kemanfaatan tersebut.

Peranan Manajer Kredit

Tujuan yang mendasar dari manajemen kredit adalah meningkatkan penjualan yang menguntungkan agar nilai perusahaan naik, dengan cara memberi kredit pada langganan yang layak. Tujuan utama dari manajer adalah menciptakan dana penjualan yang lebih besar dan menguntungkan (J. Freed Weston,1985).

Sumber Informasi Kredit

Suatu perusahaan akan mengumpulkan informasi keuangan berdasarkan data dari sejumlah sumber-sumber (J. Freed Weston,1985): Laporan Keuangan; Pertukaran Informasi Kredit; Biro Pertukaran Informasi Kredit.

Pemberian Nasihat

Para pejabat penjualan kredit mempunyai fungsi positif yang penting dalam perusahaan. Tugas mereka tidak hanya sekedar

sebagai tukang gertak untuk piutang dagang yang belum tertagih, tetapi tugas utamanya adalah fungsi evaluasi dari informasi kredit dan fungsi penagihan, sehingga para manajer kredit bisa melakukan peran yang bernilai bagi perusahaan.

Kebijakan Penagihan

Kebijakan penagihan merujuk pada prosedur-prosedur yang digunakan untuk menagih piutang. Surat tagihan bisa dikirim kepada setiap pelanggan yang menunggak 10 hari, surat teguran yang diikuti pembicaraan lewat telepon, bisa diadakan jika pembayaran belum diterima 30 hari; dan piutang tersebut bisa dialihkan kepada perusahaan penagih (*covection agency*) setelah 90 hari. Perubahan kebijakan penagihan mempengaruhi jumlah penjualan.

Penggunaan Komputer Pada Manajemen Kredit

Berdasarkan sifatnya, manajemen kredit itu mengharuskan penggunaan komputer dalam pengendaliannya. Manajemen kredit memerlukan informasi tentang penagihan, kompilasi, penyimpanan, analisis dan mendapatkan kembali informasi. Yang termasuk dalam pencatatan adalah tanggal terjadinya piutang dagang, jumlah yang dipinjam, batas maksimum kredit yang diberikan kepada pelanggan dan catatan tentang pembayaran yang lalu. Secara periode, komputer dapat menyajikan data piutang dagang yang lewat jatuh tempo untuk mendapat perhatian khusus dari manajer kredit. Penggunaan komputer meningkatkan ketersediaan jumlah dan frekuensi informasi bagi manajer kredit. Informasi tersebut memperlancar interaksi dengan pelanggan dan memungkinkan bagian manajemen kredit untuk berkomunikasi dengan divisi lain di dalam perusahaan dan juga manajer perusahaan dengan cepat dan efektif. Jadi, efektivitas dari bagian kredit telah ditingkatkan dengan penggunaan arus informasi yang disajikan komputer, yang jika tidak demikian halnya

dapat menjadi terlalu mahal dan banyak memakan waktu.

Simpulan

Pada dasarnya memang tidak ada risiko yang sama sekali dapat dieliminasi. Yang ada adalah penanggulangan risiko dengan penerapan Manajemen Risiko ke dalam aplikasi GCG, akan memaksimalkan nilai perusahaan perbankan itu sendiri, mendorong pengelola dunia perbankan semakin professional, mendorong setiap lapisan Organ dunia perbankan membuat keputusan dan menjalaninya dengan berlandaskan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatkan kontribusi dunia perbankan dalam perekonomian nasional, dan meningkatkan investasi nasional. Pengukurannya GCG dapat dituangkan kedalam Scorecard *Corporate Governance*.

Daftar Pustaka

- Bakrie, Aburizal. 2000. *Good Corporate Governance: Sudut Pandang Pengusaha*. Jurnal Reformasi Ekonomi Vol. 1, No. 2, Oktober – Desember, Hal: 21 – 27.
- Farid H & Sudomo S. 1998. *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*. Edisi kedua.
- Hinuri, H.2002. *Perjalanan Penerapan Good Corporate Governance di PT Bank Niaga, Tbk*. Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia dan Sinergy Communication. I- p.174-180.
- Indra, 2003. *Nilai Index Corporate Governance Indonesia 74,61*. Auditor, 10/ Tahun II, 54-55.

Mulyadi, 2001. *Balance Scorecard: Alat Manajemen Kontemporer untuk Pelipatganda Kinerja Keuangan Perusahaan*

Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia. Pearson-Prentice Hall. Jakarta: PT Prenhallindo.

Paimpo, 2003. **Pengawasan Ala Bank Indonesia**. Auditor, 10/ Tahun II, p.44-45.

The Essence of Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia, 2002. Edisi Pertama- Yayasan Pendidikan Pasar Modal dan Sinergy Communication.

Purwatiningsih & Warrouw M.1998. Anggaran : *Perencanaan dan pengendalian laba*.Fifth Edition. Jakarta : Salemba Empat.

www.infobank.co.id; download 2 November 2004, Peringkat 200 Bank di Asia Tenggara.

Tjager, I N., et. all. 2003. Corporate Governance: Tantangan dan

www.mediaeditor.com
www.bi.go.id